BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang dibentuk setelah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Munculnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan (*Judicial Review*).¹ Selain Mahkamah Agung kehadiran Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan peristiwa kenegaraan modern abad ke-20.²

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam melaksanakan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan serta lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi sebagai pengawal utama konstitusi (*Guardian of The Constitution*).³ Secara konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang diatur didalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

¹ Marwan Mas, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017. hal., 35

² Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010. hal. 5

³ Inosentius Samsul, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan MK: Kewenangan Siapa, *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 10/II/P3DI/Mei/2014, hal. 1

menyebutkan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dalam menjalankan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal nilai konstitusi dan demokrasi. dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Nabitatus Sa'adah menerangkan:

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁴

Selain kewenangan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 mengatur kewajiban Mahkamah Konstitusi yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie., SH menyatakan bahwa;⁵

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat Mahkamah Konstitusi

⁴ Nabitatus Sa'adah, Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 Issue 2, 2019. hal. 240

⁵ Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Moderen Dan Terpercaya*, Sekretariat Jendral MKRI, 2004, hal. IV.

bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat

Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu dari beberapa kewenangan yang dimiliki MK yang secara konstitusional diatur dalam UUD 1945. Pemilihan umum merupakan suatu bentuk penerapan sistem demokrasi yang berjalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mengusung asas kebebasan dalam pelaksanaannya harus menjamin hak seluruh rakyat untuk memilih orang-orang yang mereka pilih sebagai wakil rakyat.

Menurut Miriam Budhiarjo menyatakan bahwa:

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada Negara Demokrasi. Dengan demikian Pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasimasyarakat.⁶

Proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang di sebutkan dalam Pasal 22E Ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Selain pemilu salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau Pilkada adalah pemilihan langsung yang diselenggarakan di Indonesia oleh warga negara yang

⁶ Miriam Budhiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 461.

memenuhi syarat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁷

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pilkada untuk memutuskan siapa yang harus memimpin pemerintahan suatu daerah.⁸ Penyebutan kepala daerah memiliki perbedaan penyebutan di berbagai negara. Di negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Gubernur adalah jabatan kepala pemerintahan negara bagian (state) sedangkan di negara-negara yang berbentuk kesatuan (unitary state) seperti Indonesia dikenal jabatan kepala pemerintah daerah atau umumnya disebut dengan kepala daerah.⁹

Pilkada merupakan sarana pelaksanaan demokrasi pada tingkat local (daerah). Sama dengan pemilihan umum (Pemilu), Pilkada menjadi salah satu cara yang digunakan untuk memberikan rakyat kesempatan secara langsung dalam menentukan pemimpinnya.¹⁰ Sengketa hasil pilkada merupakan salah satu sengketa yang paling banyak di putus oleh Mahkamah Konstitusi, dilihat di laman Mahkamah Konstitusi (24 November 2023) sebanyak total 1136 putusan.

⁷ Rosidi, Ahmad, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 6 No. 2, 2018. hal. 142

⁸ Yostrio, Zarkasi, M. Amin, Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal Of Constitutional Law*, Vol 2, No. 3, 2022. hal. 380

⁹ Geofani Milthree Saragih, Mirza Nasution, Dinamika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Indoesia, *Jurnal Dedikasi Hukum*. Vol. 2, No. 2, 2023. hal. 120

¹⁰ *Ibid*, hal. 121

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pilkada pada mulanya adalah kewenangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dahulu mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, kewenangan tersebut dialihkan ke Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004.

Namun Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013 melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada. Hal itu disebabkan karena Mahkamah Konstitusi menilai rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemilihan umum itu meliputi; pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD, sedangkan rezim pemilihan kepala daerah itu meliputi; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.¹¹

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional memutus sengketa Pilkada melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Semenjak Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan tersebut Pilkada untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi termasuk dalam bagian Pemilu. Ini juga yang melatar belakangi munculnya wacana untuk membentuk badan peradilan khusus yang menangani sengketa Pilkada. Setelah putusan

¹¹ Baharuddin Riqiey, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. *Jurnal APHTN-HAN* 2. 2023, hal. 112

tersebut, Mahkamah Konstitusi memegang kewenangan dalam memutus sengketa Pilkada hingga dibentuknya suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah, yaitu suatu badan peradilan khusus.¹²

Untuk menindak lanjuti putusan tersebut Pembentuk Undang-Undang berencana membentuk lembaga khusus yang menangani pilkada yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) mengenai lembaga yang bewenang menangani sengketa pilkada yang lebih tepatnya diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyebutkan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”, dan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.” Dengan itu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan Pilkada masih berlaku hingga dibentuknya badan peradilan khusus.

¹² Geofani Milthree Saragih, Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Outusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 2 No. 2, 2022, hal. 135

Namun demikian hingga saat badan peradilan khusus tersebut belum dibentuk Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada tahun 2022 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 menyatakan ketentuan pada Pasal 157 Ayat (1), (2) dan (3) mengenai badan peradilan khusus inkonstitusional bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas penulis tertarik menganalisis bagaimana alasan pertimbangan Hakim Mahkamah

Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang membatalkan Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan apa konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PEMBATALAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 85/PUU-XX/2022 terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

2. Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan dapat Menambah wawasan, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan ataupun kajian ilmiah pada umumnya, dan khususnya pada ilmu hukum Tata Negara.

b. Praktis

Dapat memberikan referensi kepada para pembaca baik pada kalangan masyarakat umum, mahasiswa, maupun akademisi yang berkaitan dengan Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran maupun sumbangan pemikiran bagi para penegakan hukum berkaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Sehingga penelitian ini dapat memperkaya khasanah berfikir bagi mahasiswa, akademisi dan penulis sendiri

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda serta memudahkan penulis dan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka dijelaskan beberapa

pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis

Pengertian Analisis diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diawali dengan memeriksa dan menguraikan suatu masalah untuk mengungkap keadaan sebenarnya, atau proses pemecahan masalah yang diawali dengan dugaan akan kebenarannya¹³

Menurut Komaruddin didalam Yuni Septiani Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹⁴

Menurut Wiradi, analisis adalah kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu subjek menjadi bagian-bagian yang berbeda dan mempelajari bagian-bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan.¹⁵

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan tahap dimana majelis hakim

¹³ S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997. hal. 40.

¹⁴ Yuni Septiani, dkk, Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual, *Jurnal Teknologi dan Open Source*, VOL. 3 No. 1, Juni 2020

¹⁵Husnul Abdi, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli* <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> . Diakses 23 November 2022

mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat¹⁶

Pertimbangan hukum dalam suatu putusan, menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, meliputi pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan

Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan meliputi, pendiriran pemohon terhadap permohonannya, keterangan pemberi keterangan, keterangan pihak terkait, keterangan ahli/saksi dan/atau hasil pemeriksaan alat-alat bukti. Sedangkan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi, permasalahan utama permohonan; kewenangan Mahkamah; kedudukan hukum pemohon; alasan permohonan; dan pendapat Mahkamah

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk setelah perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet V, 2004 hal. 140

Indonesia Tahun 1945. Mahkamah konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawah nya.

4. Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah pernyataan yang diberikan oleh Hakim, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara¹⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan putusan adalah suatu pernyataan hakim yang berdasarkan kewenangannya dibuat dalam bentuk tertulis yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemudian diucapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.

5. Pembatalan

Pembatalan dalam penelitian ini adalah pernyataan hakim dalam putusan 85/PUU-XX/2022 yang membatalkan atau menyatakan Inkonstitusional terhadap Pasal 157 Ayat (1), (2) dan Menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* PT. Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal., 203

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dalam Undang-Undang MK Pasal 57 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bisa dilakukan apabila undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD 1945), maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Pengujian ini biasanya disebut dengan *judicial review*

6. Putusan No: 85/PUU-XX/2022

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 merupakan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Permohonan ini mengajukan konstusionalitas Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang mengatur:

- 1) Pasal 157 ayat (1) “Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”;
- 2) Pasal 157 ayat (2) “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional”;
- 3) Pasal 157 ayat (3) “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Pada Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.

Menyatakan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kewenangan

Kewenangan berarti kekuasaan formal yang dipegang oleh seorang pejabat atau lembaga, dan juga merujuk pada kompetensi pembuatan hukum yang dapat dilakukan berdasarkan peraturan formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

Menurut H.D Stout menyatakan:

Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁹

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Secara normatif, pengertian wewenang diartikan sebagai kemampuan yang diberikan oleh suatu undang-undang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰ Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan dari pembentuk undang-undang kepada suatu institusi pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.²¹

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 72

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 65

²¹ Ridwan HR, *Op Cit*, hal. 104

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan kepada organ yang lain.²² Dalam delegasi memuat suatu penyerahan, yaitu dimana kewenangan pemberi wewenang untuk selanjutnya menjadi kewenangan penerima wewenang. dan selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat terjadi ketika instansi pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh instansi lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.²³

2. Teori *Judicial Review*

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang, sering dikenal dan disebut dengan istilah *Judicial Review*, namun istilah ini juga digunakan oleh Mahkamah Agung dalam hal menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, istilah *Judicial Review* dan *Constitutional Review* sendiri sebetulnya memiliki makna yang berbeda, istilah *judicial review* lebih luas daripada *Constitutional Review*, sebab

²² *Ibid*, hal. 105

²³ Pelimpahan Wewenang Atribusi, Delegasi, dan Mandat, dalam <https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Mandat.pdf>, di akses 3 April 2023, pukul 15.21 Wib

istilah Judicial Review menunjukkan objek yang diujinya tidak hanya mengenai produk hukum berbentuk undang-undang, tetapi juga mencakup peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.²⁴

Pendapat yang lain juga diutarakan oleh Munir Fuady dalam bukunya Teori Negara Hukum Modern, menjelaskan tentang Judicial Review adalah suatu pranata dalam ilmu hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pengadilan umum, atau badan pengadilan khusus, ataupun lembaga khusus untuk melakukan peninjauan ulang, dengan jalan menerapkan atau menafsirkan ketentuan dan semangat dari konstitusi, sehingga dari peninjauan ulang tersebut dapat menguatkan atau membatalkan atau menyatakan batal, atau menambah atau mengurangi terhadap suatu tindakan berbuat atau tidak berbuat dari aparat pemerintah (eksekutif) atau dari pihak-pihak lainnya (termasuk parlemen).²⁵

Kewenangan Judicial Review dalam pengertian Hukum Konstitusi merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung atau lembaga yudisial lainnya (seperti Mahkamah Konstitusi) di Indonesia, untuk membatalkan setiap tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang dilakukan oleh pihak legislatif dan atau eksekutif, termasuk membatalkan undang-undang, dengan alasan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan konstitusi, sehingga kewenangan Judicial Review ini menjadi

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 4

²⁵ Hasannudin Hidayat, Darsis Humah dan Saiful, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Hasil Ratifikasi Perjanjian Internasional, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 14, No. 2, 2020, hal. 110

semacam pagar penyelamat terhadap konstitusi agar tidak diselewengkan dalam praktik.²⁶

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.²⁷

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak

²⁶ *Ibid*

²⁷ Mukti Arto, *Loc. Cit*, hal. 140

disangkal.

- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan²⁸

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum

4. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum merupakan suatu pendekatan pada penemuan hukum dimana peraturannya telah ada tetapi belum cukup jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa nya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus.²⁹

²⁸ *Ibid*, hal. 142

²⁹ Afif Khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Al' Adl*, Vol IV, No. 11, 2014. hal. 10

Penafsiran merupakan tugas yang sangat penting dalam bidang hukum. Penafsiran adalah suatu cara untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks hukum guna menyelesaikan suatu perkara atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara nyata. Di samping hal itu, dalam bidang hukum ketatanegaraan, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai sarana perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.³⁰

Metode penafsiran hukum (*law interpretation*) dan penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang dapat dilakukan oleh hakim sebagaimana digambarkan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo dalam Marwan Mas, dapat dilakukan dalam dua bentuk berikut:³¹

Metode Interpretasi Hukum, yaitu penafsiran dalam undang-undang, tetapi berpegang pada kata-kata atau bunyi peraturannya, yang terdiri atas:

- 1) Interpretasi Subsumtif, yaitu hakim menerapkan teks atau kata-kata suatu ketentuan undang-undang terhadap kasus in-konkreto (fakta kasus) tanpa menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut di sini hakim hanya menerapkan ketentuan pasal undang-undang

³⁰ *Ibid.* hal. 11

³¹ Marwan Mas, *Op cit.* hal. 119-125

yaitu mencocokkan fakta kasus dengan ketentuan undang-undang yang dilanggar

- 2) Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu peraturan perundang-undangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai symbol terhadap suatu peristiwa
- 3) Interpretasi ekstensif, yaitu penafsiran yang lebih luas daripada penafsiran gramatikal, karena memperluas makna klausa khusus menjadi klausa umum sesuai dengan kaidah tata bahasa.
- 4) Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system peraturan perundang-undangan.
- 5) Interpretasi sosiologis dan teologis, yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga Masyarakat.
- 6) Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari pembuat undang-undang saat diundangkannya sebagai ukuran dalam menafsirkan suatu peristiwa hukum, dan sumbernya dilihat pada catatan pembahasannya di DPR³²

Menurut Bobbit dalam Marwan Mas, ada enam macam dari metode penafsiran konstitusi:³³

³² *Ibid*, hal. 120-122

³³ *Ibid*, hal. 126

- a. Penafsiran tekstual (*textualism or literalism*) atau penafsiran harfiah, dilakukan dengan cara memberikan makna pada kata-kata dalam teks atau dokumen yang dibuat oleh badan legislatif.
- b. Penafsiran historis (*Penafsiran originalism*), adalah proses penafsiran suatu konstitusi dengan melihat bagaimana konstitusi dirancang, disetujui, dan disahkan oleh perumus aslinya atau oleh lembaga yang diakui. Jadi, digunakan pendekatan original inten terhadap norma-norma hukum konstitusi.
- c. Penafsiran doctrinal, dilakukan dengan memahami aturan undang-undang melalui “Sistem preseden” atau melalui praktik peradilan.
- d. Penafsiran structural, mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi (UUD) yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan.
- e. Penafsiran etikal, yaitu menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana tercantum dalam konstitusi (UUD)³⁴

F. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penelitian terhadap beberapa literatur terdahulu maka penulis memilih beberapa referensi. Dengan demikian akan diketahui apa saja yang membedakan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yang penulis jelaskan sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, hal. 126-127

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fitrah Dhani Prianto	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.	Penelitian ini membahas tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk memutus sengketa hasil Pilkada pasca Putusan 85/PUU-XX/2022
2	Nova Umdah Fadiah	Tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūrīyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Undang-Undang	Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama sama mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.	Penelitian ini membahas tentang mengapa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022; dan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dustūrīyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala

		Nomor 10 Tahun 2016)		Daerah berdasarkan Putusan MK No. 85/PUU- XX/2022.
3	Muhammad Fajri Zulfi	Dinamika Badan Peradilan Khusus Pemilihan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022)	Persamaan dengan penelitian ini atas adalah sama sama mengkaji tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.	Penelitian ini membahas tentang apa yang melatarbelakangi pembentukan badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan apa yang mendasari perubahan pendirian Mahkamah Konstitusi terhadap badan peradilan khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 85/PUU-XX/2022 tentang Pembatalan Pasal 157 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bagaimana konsekuensi dari Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan

atau mengerjakan sesuatu, bagi kepentingan ilmu pengetahuan.³⁵ Metode merupakan titik awal menuju proses-proses akhir dibidang pengetahuan tertentu, bersifat spekulatif, bagi ilmu-ilmu normatif metode merupakan jalan menuju norma-norma yang mengatur perbuatan atau tingkah laku masyarakat melalui pembentukan atau perumusan suatu norma sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

Penelitian hukum dan hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai norma tertulis dan penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.³⁶ Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu pengkajian hukum terhadap aturan-aturan hukum meliputi pengkajian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan atau sejarah hukum dengan tujuan untuk menjelaskan hukum sesuai dengan kasus tertentu.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Untuk menerapkan pendekatan perundang-undangan, seseorang harus mengkaji seluruh peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah hukum yang dihadapi.³⁸

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 13

³⁶ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Depok, 2018, hal. 38.

³⁷ *Ibid.* Hal. 86-87

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal., 93

Pendekatan perundang-undangan dibutuhkan di dalam penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.³⁹

Pendekatan konseptual dibutuhkan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkannya banyak sumber hukum baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier, dalam membahas mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu metode pendekatan konseptual sangat cocok digunakan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi dan telah menghasilkan putusan pengadilan yang sah tetap.⁴⁰

Dengan mencermati hal-hal yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 sehingga dapat

³⁹ Bambang Sugono, *Op. Cit.*, hal. 91

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hal. 93

digunakan untuk dijadikan alasan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang ada

1. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder, yakni bahan hukum sebagai referensi dari kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat atau yang membuat orang menaati hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu website, dan Kamus Hukum yang dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum sebelumnya.

2. Analisis bahan hukum

1. Mengidentifikasi

Identifikasi merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan dengan beberapa proses seperti mencari, menemukan, meneliti, mencatat data serta informasi tentang seseorang atau sesuatu. Secara mudahnya, identifikasi adalah suatu tindakan yang ada hubungannya dengan penetapan atau penentuan identitas beberapa hal seperti benda, seseorang dan lain sebagainya⁴¹. Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti yakni berkaitan dengan putusan 85/PUU-XX/2022 sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian

⁴¹ Nanda Akbar Gumilang, *Pengertian Identifikasi: Proses, Bentuk, dan Contohnya*, https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-deskriptif/#Pengertian_Identifikasi, diakses 22 Oktober 2023, pukul 15.08 WIB

2. Menginventarisasi

Menurut Dariyanto dan Mohammad Farid, Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku.⁴² Dalam penelitian ini penulis menginventaris semua bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Mensistematisasi

Mensistematisasi berarti mengorganisasikan segala sesuatunya ke dalam kelompok-kelompok yang koheren atau menurut suatu rencana tertentu. Dalam penelitian ini penulis mensistematisasikan semua bahan hukum yang diperlukan untuk penelitian.

4. Menginterpretasikan

Menurut Ricoeur, interpretasi adalah proses berpikir teratur yang dilakukan untuk menemukan makna yang tersembunyi dari makna yang telah muncul dalam sebuah lipatan taraf. Lipatan taraf berada pada suatu makna literal. Simbol dan makna menurut Ricoeur mempunyai sifat yang saling berkorelasi dan juga mempunyai banyak makna.⁴³ Dalam penelitian ini penulis menginterpretasi semua bahan hukum untuk menemukan makna atau hasil dari masalah yang diteliti.

⁴² Daryanto dan Mohammad Farid, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Gava Media, Yogyakarta, 2013, hal. 124.

⁴³ Gilang P, *Pengertian Interpretasi Menurut Para Ahli dan Berbagai Tujuannya!*, https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-interpretasi/#2_Walin, diakses 22 Oktober 2023, Pukul 17.17 Wib

5. Mengevaluasi

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa Inggris "evaluation" yang diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Nurkencana (1983) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ada yang akan diselesaikan pada bab berikutnya. Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini. Maka penulis menyusunnya kedalam empat bab :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN, JUDICIAL REVIEW, DAN PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam bab berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Kewenangan, Tinjauan umum tentang Judicial Review dan Tinjauan umum tentang pertimbangan hakim,

BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN

⁴⁴ Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Evaluasi>, diakses 23 Oktober 2023, Pukul 01.46 Wib

NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PEMBATALAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016. Dalam bab ini yaitu akan diuraikan jawaban dari beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat dilatar belakang masalah.

BAB IV PENUTUP. Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran